

SPIRITUALISME DAN POLITIK (FILOSOFI DALAM POLITIK DI INDONESIA)

Wahyu Wiji Utomo, Muhammad Aswin
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
wahyuwijiutomo@uinsu.ac.id, maswinmap@yahoo.com

Abstract

Many people consider politics as a tool to gain power, it is not wrong but on the other hand politics has a noble purpose. The purpose of this study focuses on the political problems in Indonesia which experience spiritual emptiness and the influence of the spiritualism movement on politics. The method used is a qualitative method with descriptive analysis research to see various aspects of current political problems. As a result of the spiritual emptiness it was found that the politics that developed did not have a direction and purpose, so politics was oriented only to power and not to the people. With this, at least politics in Indonesia must return to the philosophical spirit, which is the welfare of the people. The solution offered is the idea of improving political spiritualism, with religion as the basis for improving the current political situation.

Keywords: Spiritualism, Philosophical, Political

Abstrak

Banyak orang menilai politik sebagai suatu alat untuk meraih kekuasaan, hal tersebut tidaklah salah namun di sisi lain politik memiliki tujuan yang mulia. Tujuan penelitian ini berfokus tentang problematika politik Indonesia yang mengalami kekosongan spiritual dan pengaruh gerakan spiritualisme terhadap politik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian analisis deskriptif untuk melihat berbagai aspek mengenai berbagai problematika politik saat ini. Akibat adanya kekosongan spiritual ditemukan bahwa politik yang berkembang tidak memiliki arah dan tujuan, sehingga politik hanya berorientasi pada kekuasaan dan bukan pada rakyat. Dengan ini setidaknya politik di Indonesia harus kembali kepada ruh filosofis, tujuannya yaitu adalah mensejahterakan rakyat,. Solusi yang ditawarkan adalah

gagasan mengenai perbaikan spiritualisme politik, dengan agama sebagai dasar untuk memperbaiki keadaan politik saat ini.

Kata kunci : Spiritualisme, Filosofis, Politik

Article History: *Received 20 February 2020, Revised: 15 March 2020, Accepted: 29 April 2020, Available online 01 June 2020*

Pendahuluan

Spiritualisme dan politik sering sekali mengalami kontradiksi dari segi makna dan hubungannya di dalam konteks kehidupan sosial dan juga ketatanegaraan, kata spiritualisme sering dipandang sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tuhan, agama, ke rohanian, dan berbagai hal yang sifatnya jauh dari keduniawian. Sebaliknya politik lebih dipandang sebagai segala sesuatu yang sifatnya kekuasaan.

Sementara itu ada pula yang menyatakan bahwa spiritualitas tidak membutuhkan ritualitas, spiritualitas di sini menjadikan ritual sebagai salah satu indikator spiritualitas. Ritual itu sendiri merupakan cara seseorang membangun hubungan dengan Tuhan dengan mengaktifkan banyak komponen saraf yang berujung pada hadirnya suasana psikologis dan tidak berhenti pada aspek pribadi tetapi mengejawantah dalam kehidupan sosial. Dengan cara ini, spiritualitas memiliki makna social dan tidak semata-mata bernilai subjektif bagi individu. (Atika 2018; 97)

Sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas malah dekat hubungan dengan terorisme seperti yang diungkapkan oleh (Kristianto 2018:1) yang menemukan bahwa setiap zaman memiliki corak atau model berteologi spiritualitas politiknya masing-masing. Namun pada masa sekarang, dengan mengelaborasi hasil studi pustaka dan memperhatikan konteks terorisme di Indonesia serta perjalanan sejarah panjang teologi spiritualitas politik gereja.

Seperti yang diungkapkan (*Faridah, Mathias* 2018 : 502) bahwa kita harus mengajak dan mengilhami masyarakat untuk

tetap terus belajar dan bersikap terbuka agar bisa memahami spiritualitas dan esensi memeluk agama agar meredam sikap keagamaan yang radikal yang bercampur dengan politik.

Problem yang masih belum terselesaikan adalah mendudukan spiritualisme dan politik yang dianggap oleh banyak orang bahwa spiritualisme sama dengan agama, dan tidak relevan dikaitkan dengan politik. Dalam pikiran banyak orang kecenderungan menolak panduan antara spiritualitas dan politik, disebabkan oleh tidak adanya atau tidak dipahaminya pembedaan antara agama dan spiritualitas.

Diharapkan bahwa penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kesenjangan antara dua pokok pikiran tersebut. Khususnya bagi mereka yang menolak pikiran spiritualitas dan politik. Bahwa hakikatnya spiritualitas mencakup dimensi yang lebih luas yang tidak hanya terpaku pada dimensi agama saja. Kemudian penelitian ini bisa menunjukkan bahwa Spiritualisme Dan Politik bisa menjadi Sebuah integralisme Dalam Bernegara

Bagaimana aspek-aspek kesamaan itu dimainkan dalam pergulatan politik dan apakah ada pengaruh spiritualisme terhadap dunia perpolitikan serta bagaimana bentuk atau gambaran paham spiritual kepada politik. Kemudian apakah spiritualisme sebagai suatu paham yang *mengutamakan kerohanian* atau paham *kesadaran universal* dapat dihubungkan dengan persoalan politik. Inilah yang merupakan centre pembahasan dalam tulisan ini. Segala kontribusi yang menambah kelengkapan dan keakuratan informasi untuk tulisan ini sangat diharapkan.

Penelitian kualitatif menjadi pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini. Penelitian kualitatif memiliki ciri yang berbeda dan kegunaan yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif merupakan upaya seorang peneliti untuk mengukur sesuatu, maka penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai upaya untuk

memaknai data-data dalam proses pencarian kebenaran yang menggunakan logika induksi (Ritchie, Lewis 2003, 26).

Menurut Ritchie, pada dasarnya penelitian kualitatif memiliki empat fungsi yang digolongkan sebagai berikut: *pertama*, kontekstual, yang bertujuan untuk memaparkan sebuah fenomena yang terjadi; *kedua*, eksplanatori, yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi dalam sebuah fenomena; *ketiga*, evaluatif, yang menilai seberapa baik sesuatu dapat berjalan, *keempat*, generatif, yang menciptakan sesuatu yang baru untuk mengembangkan teori sosial yang telah ada (Ritchie, Lewis 2003, 26). Studi ini sendiri memiliki fungsi eksplanatori karena menjelaskan hubungan antara Signifikansi Gerakan Spiritualisme terhadap Politik.

Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah dengan menggunakan metode studi literatur. Berbagai data sekunder di antaranya: buku, jurnal, serta berita-berita dari internet akan dijadikan sebagai sumber data penelitian ini. Tidak adanya akses terhadap data-data primer seperti penelitian lapangan ataupun wawancara mendalam mengenai Signifikansi Gerakan Spiritualisme terhadap Politik. menjadi kelemahan sekaligus keterbatasan dari penelitian ini.

Penulis mengafirmasi gagasan-gagasan reflektif subjektif penulis dengan menggunakan referensi para pemikir terdahulu yang mewacanakan topik ini dalam buku yang terpublikasi. Refleksi penulis juga diperkaya dengan pemikiran penting para tokoh lain yang sudah menunjukkan kepedulian akademik mereka pada lingkungan alam melalui jurnal terkait topik bahasan ini. Dengan demikian, metode analisis kualitatif-kritis-hermeneutis mewarnai keseluruhan pembahasan ini.

Dimensi Spiritual dan Politik

Dimensi Historis

Tanpa mengurangi hakikat sebenarnya, mengenai defenisi, ruang lingkup dan sifat ilmu politik, mungkin ada yang

beranggapan bahwa selain ada pandangan dan gejala politik yang sempit dan terbatas, dengan meletakkan penekanan pada fungsi-fungsi politik dan pelaksanaannya sebagai suatu proses atau jenis kegiatan, di pihak lain menekankan struktur politik dan mengkiblatkan dirinya pada berbagai jenis lembaga politik. Salah satu persoalan yang sering menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan banyak orang adalah persoalan politik baik dalam urusan pemerintahan ataupun agama. Sisi positif dari pergulatan politik ini dipandang sebelah mata dan jauh dari hakikat politik sesungguhnya, yaitu membangun sistem, aturan yang diselimuti moralitas humanis bagi siapa saja.

Bila kita menggali lebih dalam bagaimana Demokratisasi Sistem Politik dalam Islam dan Belajar dari Sistem Kekhalifahan Klasik, maka yang terjadi sekarang ini adalah Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern maka yang diperlukan adalah Respons dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani. Sekedar untuk membandingkan bagaimana sebenarnya transformasi spiritualitas masuk dalam nilai-nilai politik maka untuk itu kita perlu mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Jika kita melihat akar sejarah dari Nabi SAW, setelah berhijrah ke Madinah bertindak sebagai Rasul Allah dan kepala negara sekaligus kenyataan sejarah yang tidak dapat diingkari. Kenyataan ini tercermin dengan jelas dalam gaya dan sifat wahyu Tuhan yang diturunkan kepada beliau. Kemudian wahyu Tuhan berkembang menjadi peraturan dan sistem yang harus ditegakkan dalam kepemimpinan beliau, sebagaimana yang termaktub dalam Alquran. Nilai-nilai yang ada pada peraturan dan sistem yang diturunkan Tuhan memiliki eksperisi yang sangat kuat dalam tema-tema pokok yang meliputi empat hal esensial yaitu :

1. Berkenaan dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Berkenaan dengan kewajiban sosial manusia terhadap sesama

3. Berkenaan dengan tanggung jawab mutlak kehidupan masing-masing pribadi di hadapan Tuhan setelah kematian.
4. Berkenaan dengan ajaran pokok di bidang kemasyarakatan yang dihadapi Nabi dan kaum muslimin secara keseluruhan. (Madjid 2004 : 193)

Hal pertama yang dilakukan Nabi SAW adalah mengambil keputusan penting yaitu merubah nama kota Yatsrib kemudian berubah menjadi kota Madinah. Keputusan perubahan nama ini jika ditilik dari akar sejarah yang ada maka yang dilakukan Nabi jelas meyerupai sebuah deklarasi untuk mendirikan sebuah sosial masyarakat politik modern, yang disebut oleh banyak orang dengan Negara Madinah. Jika diperhatikan dari segi pemaknaan arti dasar Madinah adalah *tempat, sistem* atau *hunian kepatuhan*. Pemahaman ini mengindikasikan bahwa Nabi SAW selaku *temporal power spirit* umat diperintahkan oleh Allah SWT, untuk membangun sebuah tempat untuk melakukan segala aktivitas dakwah Islam.

Sistem kepatuhan masyarakat sepanjang sejarah umat manusia selalu disediakan dan ditumbuhkan oleh agama, sehingga agama dalam bahasa Arab disebut '*din*'. Karena itu, dari sisi praktis semua sistem politik atau ketatanegaraan sebelum zaman modern terwujud berdasarkan agama. Bahkan kajian keserjanaan modern mengakui peranan agama dalam sistem kenegaraan sekuler modern sekalipun. Amerika Serikat misalnya, akar-akar pandangan moral dan etis yang asasi dalam ajaran keagamaan, tertuang dengan jelas dalam dokumen terpenting negara yaitu *Deklarasi Kemerdekaan*. Meskipun Thomas Jefferson yang menyusunnya mengaku sebagai bukan seorang Kristiani, melainkan seorang '*Deis*' (*universalis*), sehingga dalam teks *Deklarasi Kemerdekaan* Amerika Serikat itu tidak terdapat jargon-jargon keagamaan Kristen. Namun, dengan jujur Thomas mengatakan bahwa pandangan etis dan moralnya itu diilhami oleh ajaran Isa al-Masih. (Madjid 2004 : 194)

Demikianlah, dari dua contoh pembentukan pemerintahan di atas, terbukti bahwa keyakinan terhadap yang benar secara universal, adalah fondasi yang melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang didukung oleh aturan serta nilai-nilai agama dan atau lebih tinggi dari struktur agama. Ungkapan inilah, yang dapat dijadikan titiktemu antara spiritualisme dan politik, sehingga catatan sejarah ini dapat dikategorisasikan pada wilayah *spiritus-politic esoterisme*.

Dimensi Psikologis

Perkembangan dan kemajuan zaman seiring dengan kebutuhan manusia dan tidak terbantahan bagaimana semua itu berjalan begitu cepat, disengaja atau tidak, siap atau tidak siap, yang jelas manusia tidak dapat lari dari kondisi demikian. Yang pasti agama sebagai ikatan yang mengatur segala lakon manusia sudah ditetapkan dalam Kitab, jika berbuat baik sesuai aturan, maka memperoleh kebahagiaan dan jika berbuat salah melanggar aturan, maka menanggung kesengsaraan.

Spiritualisme tinjauan perspektif ini, dikembangkan atas dasar keyakinan bahwa manusia, alam dan isinya adalah ciptaan Tuhan yang diwujudkan dengan ketundukan pada aturan-aturan agama. Secara alamiah manusia merupakan bagian dari Tuhan, maka jika manusia melupakannya akan terjadi ketidakseimbangan dalam diri, yang mengakibatkan kebimbangan bahkan kehampaan hidup. Kebaikan tertinggi dari spiritualitas ini adalah kemampuan manusia menyatukan keinginannya dengan keinginan Tuhan, baik dalam hal aktifitas, perlakuan terhadap diri sendiri dan orang lain (Muthohar 2014:436), alam fisik maupun non fisik. Sehingga konsekuensinya adalah manusia akan merasa tenang, bahagia dan damai terhindar dari kegelisahan dan putus asa (Murthadah Muthahari 2011: 48). Pencapaian ini merupakan hal yang lazim, sebab manusia memiliki unsur keilahiyatan, senada dengan ajaran agama yang termaktub dalam Alquran.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٢٤﴾

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".

Komaruddin Hidayat menjelaskan, setidaknya terdapat empat domain bagi artikulasi dan ekspresi keberagamaan, yaitu domain *pribadi*, *jamaah*, *masyarakat* dan *negara*. Masing-masing memiliki karakter dan keterbatasan tersendiri, bahkan sangat mungkin terjadi tabrakan dan inkonsistensi antara ekspresi keberagamaan di domain yang satu dengan domain yang lain.

Domain pribadi, merupakan faktor yang lahir dari aspek psikologis seseorang dalam mengimani keyakinannya sebagai bentuk kesalehan dan ketulusan beragama kepada Tuhan, tidak ada yang dapat melarang ataupun memaksa. Namun dalam ekspresi keimanan tersebut muncul dalam domain komunal atau jamaah. Acara ritual dan pendalaman keyakinan secara intensif dilakukan di domain jamaah atau kongregasi dengan mengambil tempat yang disucikan. Melalui domain inilah ekspresi keberagamaan terbentuk dalam berbagai simbol dan ritus-ritus dan bersifat homogen dan eksklusif. Tetapi domain jamaah ini tidak selamanya sebagai komunitas yang homogen, juga sangat memungkinkan berubah menjadi heterogen karena wilayah sebuah keberagamaan akan bertemu dengan penganut agama yang tidak seiman. Inilah yang disebut domain masyarakat, di mana agam akan selalu muncul dalam domain sosial. Lebih dari itu, dalam ranah sosial ini yang berlaku adalah hukum positif yang berlaku di wilayah

komunal bukan saja hukum kitab suci. Fenomena-fenomena ini menjadi arus deras yang membawa pada kelompok-kelompok keagamaan. (Komaruddin 2012 : 71).

Pada domain ketiga ini, wilayah sosial ini bisa saja terjadi kontestasi antar berbagai nilai dan tradisi yang datang dari berbagai agama, termasuk antar kelompok keagamaan. Keadaan ini tidak mungkin bisa didominasi oleh satu kelompok saja dan seyogianya tidak dibenarkan domain publik dikuasai dan diatur oleh sekelompok masyarakat primordial, entah etnis maupun agama. Dalam hal tersebut, pemerintahan merupakan representasi yang tepat dan sangat dibutuhkan sehingga harus didirikan sebagai sebuah negara. Ranah negara dianggap mampu masuk ke dalam publik dengan tetap menjaga keharmonisan sosial yang sangat majemuk. Identitas komunal boleh saja dipertahankan, tetapi tidak mendorong terjadinya benturan kelompok yang merusak etika dan kenyamanan publik. (Komaruddin 2012 : 73)

Pemetaan keempat domain di atas, memperlihatkan artikulasi dan perilaku spiritualisme dalam agama secara bersamaan akan melahirkan aktivitas politik. Meskipun pada kenyataannya, terkadang ada ketidak sesuaikan antara *dassollen* dengan *dassein*. Aktivitas ini dapat dikategorisasikan pada wilayah *spiritus-politic eksoterisme*.

Diakui atau tidak, bahwa proses politik Barat berbeda dengan politik non Barat, baik model maupun sistem yang telah dipakai. Seperti yang diungkapkan George Mc Turner, Kahin, Guy J. Pauker, *Comparative Piltics of Non Westren Countries, American* dalam *Political Science Review*, (London : The Free Press, 1977), halaman. 1022-1041 dan Lucian W Pye, dalam *The Non-Westren Political Process, Journal of Politics*, (Chicago : University of Chicago Press, 1965, h. 468-86). Bahwa Timbulnya sejumlah besar negara baru di Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam suasana Perang Dunia II telah membuka dimensi baru dalam disiplin ilmu politik. Ahli antropologi, etnografi, sejarah serta para orientalis yang melakukan beberapa studi tentang ilmu politik ini, hanya membahas

mengenai *masyarakat*, bukan mengenai *negara*. Namun, ketika masyarakat-masyarakat terdahulu mulai berbentuk negara-negara baru, maka tidak dapat dihindarkan perhatian para ilmuwan politik tertarik kepada urusan kenegaraan. Ilmu politik Barat ketika itu, sangat terpengaruh oleh ahli-ahli sistem yang telah mencoba untuk menunjukkan bahwa sistem politik secara umum adalah suatu sub sistem dari sistem sosial, yang menerima tantangan-tantangan maupun dukungan-dukungannya dari sistem sosial dalam bentuk masukan dan yang pada gilirannya melahirkan pembuatan judisial, legislatif dan eksekutif, seperti undang-undang, pelaksanaan peraturan, penghakiman dan semacamnya, yang dimasukkan ke dalam sistem sosial melalui apa yang disebut sebagai proses *feedback* dan diperkuat atau diperlemah oleh proses-proses tantangan maupun dukungan tersebut.

Perkembangan selanjutnya, para ilmuwan yang mengembangkan lapangan pengetahuan tentang politik ini di akhir tahun 50-an dan awal 60-an, ternyata sependapat bahwa proses politik merupakan kondisi psikologis masyarakat yang dapat tumbuh serta dipelajari dengan mempergunakan latarbelakang sosial, ekonomi, kebudayaan yang telah diwariskan sejak berabad-abad yang lalu dan pengaruhnya begitu nyata sampai sekarang.

Dimensi Filosofis

Aristoteles menulis satu risalah yang berjudul **Politeia**, yang judulnya sudah diterjemahkan sebagai *politik (politics)*. Politik bagi Aristoteles merupakan cabang pengetahuan praktis. Politik adalah bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok. Manusia adalah makhluk-makhluk *polis (negara-kota)*. Kecenderungan alamiah dari manusia ialah membentuk kelompok, bertindak dalam kelompok, dan bertindak sebagai kelompok. Maksud (tujuan, sasaran) politik sama dengan tujuan etika dan sama dengan tujuan kehidupan manusia pada umumnya, yaitu mencapai

eudaimonia, *kesejahteraan yang sangat penting dan vital bagi setiap orang.* (Loren 2005 : 857)

Bertolak arti politik dalam kajian filsafat, mengindikasikan bahasan pada persoalan penegakan etika atau moral, hal ini termasuk pada ciri modernitas pada kehidupan bernegara setiap pemerintahan. Keniscayaan penegakan moral tersebut adalah salah satu pesan universal yang dimiliki oleh konsep spiritulitas. Hanya saja dalam tataran realita perlu ada kesepakatan dan pertimbangan untuk menempatkan manifestasinya (*spiritus politik*) dalam suatu wadah yaitu negara. Keberadaan negara akan mengatur berbagai hak dan kewajiban setiap warga negara untuk memperoleh kesejahteraan di atas muka bumi ini, bahkan mengelola, mengarahkan dan menyelenggarakan kebijaksanaan umum dan yang menyangkut kelompok atau partai yang berperan dalam kehidupan bernegara.

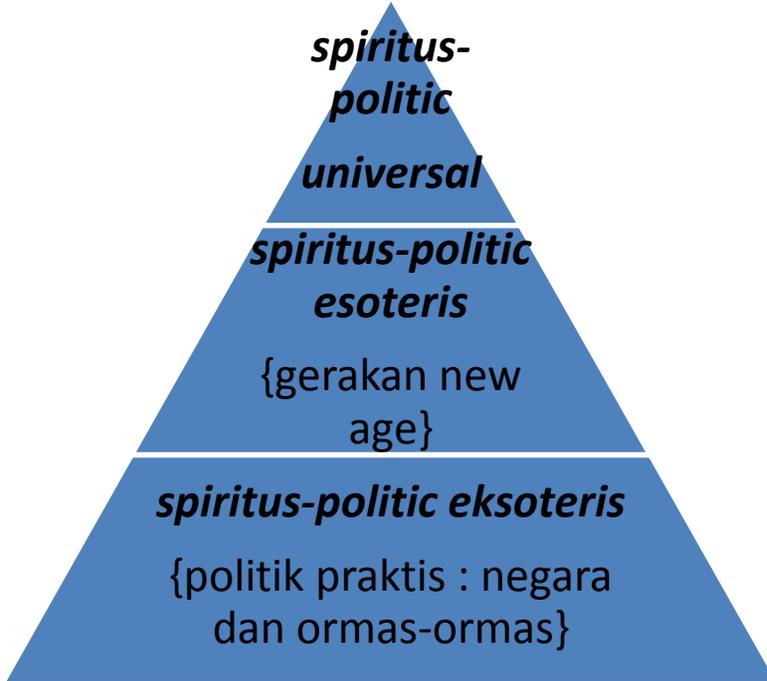
Seyyed Hossein Nasr telah berbicara tentang adanya dualisme, yaitu antara yang ilmiah, rasional, profan, antroposentrisme, dengan non-ilmiah, spiritual, sakral dan teosentrisme yang disandingkan. Nasr mencoba untuk mempersandingkan antara yang wilayah yang eksoteris maupun yang esoteris, religius dan keduniawian. Yang menarik adalah, menurutnya sesungguhnya antara eksoterisme dan esoterisme dapat dipahami bahwa dalam kajian ini terdapat aspek luaran dan dalaman. Yang luaran diwakili oleh penamaan, sedang yang dalaman hanya bisa dimengerti melalui proses pemaknaan. Pendek kata, dua aspek tersebut diwakili oleh dua kata, yaitu nama dan makna. (Schuon 1984 : 15)

Esoterik berasal dari kata *esotericism* (esoterikisme), ***esoterik*** berasal dari kata Yunani kuno *esōterikós* yang berarti suatu hal yang diajarkan atau dapat dimengerti oleh sekelompok orang tertentu dan khusus, dapat juga berarti suatu hal yang susah untuk dipahami yakni pemikiran filsafat mengenai proses evolusi dari manusia dan makhluk hidup

lainnya. Ilmu tentang akumulasi dari kebijaksanaan dari zaman ke zaman yang menampilkan sebuah sekumpulan pemikiran yang sistematis dan komprehensif tentang struktur semesta dan letak manusia dalam semesta tersebut. Mendiskripsikan kekuatan dan pengaruh yang terdapat di dalam dunia yang fenomenal dan sebuah proses untuk mewaspadai dan mengerti kekuatan tersebut. Hal ini secara mudah diartikan sebagai suatu hal yang terdapat di luar daya tangkap dan daya pikir manusia biasa dan mewakili sebuah proses evolusi makhluk hidup dari suatu titik dasar. Bagaimana semesta dapat tercipta, bagaimana kinerjanya dan peran manusia di dalamnya. Esoteris juga kadang disebut sebagai seni untuk bekerja bersama energi-energi dengan kedekatan bersama sumber spiritual tertinggi. Ajaran-ajaran ini telah membantu untuk membimbing dan membentuk peradaban demi peradaban yang berdampak terhadap kemajaun yang dialami oleh umat manusia baik dalam hal ilmu pengetahuan, politik, seni atau agama.

Lucian Pye telah menjelaskan pemikirannya dengan menganalisa konsep dan perkembangan politik dengan mendalam dan terus mengembangkan gagasannya. Dalam tulisannya, Pye menganggap bahwa perkembangan politik sebagai 'penyebaran kebudayaan dan penyesuaian, penerapan serta pembauran pola-pola hidup lama pada kebutuhan-kebutuhan baru. Politik diperlakukan sebagai pelayan dari kekuatan-kekuatan sosial, sekedar alat yang diberi bahan dari luar dan mengaduknya serta merta mengembalikannya kepada masyarakat, apakah dalam bentuk baik, buruk atau sedang, tergantung pada kualitas sistem politik tersebut. (Lucian W Pye, 1965 : 486) Hal ini dianalisis berdasarkan ketika para ilmuwan politik melihat kota Nehru yang menggerakkan roda-roda moderisasi di India, atau Sukarno mencoba membawa Indonesia ke jalan menuju ke keadilan sosial, dan para pemimpin di beberapa negara secara aktif membentuk nasib negara mereka masing-masing, bukan sebagai warisan sejarah atau tradisi-tradisi sosial-ekonomi-kebudayaan mereka,

melainkan para pemimpin telah memutuskan untuk membentuknya merupakan kesadaran bahwa politik dapat dipikirkan sebagai suatu variabel yang mandiri (*independent*) yang mampu memainkan peran yang menentukan dalam pencapaian kemajuan sebuah negara.



Analogi : Integralisasi spiritulisme dengan politik

Dari gambar piramida yang ada di atas bisa kita lihat bagaimana tingkatan Integralisasi spiritulisme dengan politik, dari gambaran tersebut penulis meyakini bahwa Spiritus politik universal mampu membawa perubahan pada gerakan-gerakan di era berikutnya atau bisa kita namakan dengan *Spiritus Politik Esoteris* ataupun gerakan *New Age*. Gerakan tersebut kemudian melahirkan tahapan baru yang dinamakan *Spiritus Politik Eksoteris* ataupun *Politik Praktis Negara Dan Ormas-Ormasnya*.

Problematika Gerakan Spiritualisme terhadap Politik di Indonesia

Gerakan spiritualisme mempengaruhi berbagai aspek terutama dalam kancah politik di negara kita saat ini, bisa kita lihat dengan munculnya berbagai pandangan politik yang didasari atas sentimen keagamaan. Indonesia adalah salah satu contoh negara di mana kekuasaan, terutama kekuasaan politik dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritualitas agama, contohnya adalah NU sebagai salah satu organisasi masa Islam terbesar di Indonesia dimana pengaruhnya bisa kita lihat dalam kontestasi politik dan kenegaraan di Indonesia kemudian menjadi sangat dominan karena kita tahu bahwa NU mempunyai basis massa yang jelas dan besar yang didasari oleh semangat keagamaan yang tinggi, meskipun masih perlu dipertanyakan Apakah keberpihakan ormas seperti NU memiliki tujuan ataupun kepentingan agama atau kepentingan politik semata, namun yang perlu disadari adalah semangat keagamaan mereka ditunjukkan langsung pada suatu sikap politik. NU selalu diperhitungkan suaranya meskipun kita tahu bahwa NU pasti selalu berada di pihak pemerintah dan tidak mungkin berseberangan dengan pemerintah maka muncullah slogan yang sering kita dengar nu tidak kemana-mana tapi NU ada dimana-mana. Hal ini mengindikasikan bahwa NU akan ada dan selalu ada untuk mendukung pemerintahan, terlepas bagaimana pemerintahan itu berjalan apakah sesuai koridor atau tidak yang pasti adalah spiritualisme politik tetap ada di dalam pemerintahan Indonesia dan NU menjadi simbol spiritualis politik tersebut

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jargon-jargon keagamaan menjadi bukti bahwa keyakinan keagamaan terhadap yang benar secara universal yang melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang didukung oleh aturan serta nilai-nilai agama dan atau lebih tinggi dari struktur agama ungkapan inilah yang menjadi titik temu antara spiritualisme dan politik. Jargon-jargon seperti ini juga muncul hubungan agama dan negara di Indonesia seperti hubbul Wathon minal pada iman atau cinta tanah air sebagian dari iman adalah slogan slogan yang sering kita dengar dimana maknanya

merupakan bahwa kecintaan kepada tanah air merupakan sebagian dari iman yang merupakan kecintaan pada agama sehingga agama dan negara pada hakikatnya nya memiliki tujuan yang sama.

Yang ingin ditekankan di sini adalah bukan pada kelompok ormas manapun namun pada penekanan agama sebagai Spiritus politik eksoteris dimana agama harus menghadapi berbagai problematika jika ingin eksis menjadi spiritulaisme politik di inonesia saat ini beberapa dinataranya adalah:

Pertama, Agama harus menghadapi kecenderungan pluralisme. Mengolahnya dalam kerangka teologi baru dan mewujudkannya dalam aksi-aksi kerjasama plural. Ketika semua kelompok akhir-akhir ini mengalami krisis identitas karena tergoda untuk mementingkan kelompoknya sendiri, sebetulnya agama justru ditantang untuk berperan mendobrak kecenderungan ke arah eksklusivisme itu. Agama mestinya hadir sebagai inspirasi untuk setiap kali melihat kembali ke Mantingan bersamanya yang lebih besar dan lebih Hakiki, memaksa orang keluar dari kepentingan sempitnya masing-masing. Agama akan tampil sebagai suara moral yang otentik. Sikap yang selalu hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri sebetulnya sama saja dengan ketidakacuhan terhadap tuntutan zaman yang real. Suatu toleransi yang malas, ignoransa ataupun ketidakpedulian yang mudah menggerogoti dirinya sendiri.

Kedua, Jika agama ini berperan penting dalam situasi kemelut postmodern, tampil dengan cara apapun sebagai pelopor perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, termasuk ketidakadilan kognitif yang biasanya diciptakan antara lain justru oleh agama-agama itu sendiri ini pun memerlukan pengkajian ulang kerangka-kerangka teologis baku secara langsung ataupun tidak langsung. kerangka teologis agama agama Ikut andil dalam menumbuhkan sikap diskriminatif terhadap agama lain, inilah yang seringkali

mengakibatkan terjadinya pertentangan antar agama, ataupun agama dengan negara.

Spekulasi Samuel P huntington yang meramalkan bahwa konflik-konflik antar peradaban yang akan muncul bukan lagi dipicu oleh faktor-faktor ideologi, ekonomi dan politik, melainkan justru dipicu oleh masalah-masalah suku agama ras dan antargolongan atau cara bisa saja terjadi. Ketika pluralitas menyampingkan tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan jalan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, konflik konflik SARA Justru lebih dipicu oleh eksklusivisme dan klaim kemutlakan masing-masing golongan.yang Ironisnya tanpa diiringi kesadaran berapa pentingnya untuk hidup bersama maka akibatnya hal tersebut hanya akan dinikmati oleh kepentingan elit elit politik yang terbilang kaum minoritas di bumi Pertiwi ini begitu juga ketika demokrasi yang kita agung-agungkan sebagai konsep ideal ternyata hanya dimiliki dan dinikmati oleh mereka mereka tadi sebenarnya bukanlah kita demokrasi seperti itu lebih tepat kalau kita ke lain sebagai Tirani yang berwajah kan demokrasi, diktator yang memakai topeng untuk mengelabui rakyat.

Ketiga, Hal ini mungkin terjadi karena negara Indonesia mungkin kehilangan spiritualisme politiknya sejak awal dan hal tersebut mengakibatkan semangat yang muncul untuk memajukan negara tidak sama dengan semangat untuk memajukan agama dan mungkin di sini tidak terjadi titik pertemuan spiritualisme agama itu sendiri tapi yang terjadi adalah titik tolak di antara kedua hal tersebut. Akibatnya adalah agama tidak bisa menjadi spiritualisme dalam membangun politik yang ada hanyalah agama menjadi simbol identitas dan kita terjebak di dalam politik identitas tersebut, hal tersebut bisa kita lihat dari berbagai masalah yang seringkali terjadi, dimana kesalahan-kesalahan dalam pengambilan kebijakan politik selalu dikait-kaitkan dengan identitas agama seseorang, atau malah yang terjadi Sebaliknya dimana dalam beberapa kasus agama menjadi topeng ataupun

kedok seseorang untuk meraih jabatan tertentu, disinilah bisa kita lihat banyak sekali para politikus yang bertopengkan atau berkedok agama, tapi ternyata gerakan yang dihasilkan oleh politikus tersebut jauh dari apa yang diharapkan oleh agama itu sendiri dan di sisi lain malah terjadi penyelewengan yang berkedok mengatasnamakan agama.

Akumulasi problematika gerakan spiritualisme terhadap politik di era sekarang ini yaitu munculnya distrust terhadap politik oleh masyarakat dan hal ini semakin berkembang setiap harinya bisa kita lihat kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin lama semakin menurun yang diakibatkan. Politik yang dilandasi dengan spiritualitas akan selalu berlandaskan pada nilai-nilai dan norma-norma agama yang akan selalu berorientasi pada kepentingan umum dan bukan pada kepentingan pribadi ataupun golongan sehingga akan nampak wujud nyata di dalam pola kegiatan sehari-hari di mana pada nilai-nilai spiritualitas akan selalu menunjukkan kepada arah kebijakan dan kebaikan untuk kepentingan publik, sedangkan yang tidak berlandaskan pada spiritualitas maka politik tersebut hanya akan menjadi sebagai alat kekuasaan untuk mencari uang ataupun kekayaan, dan bahkan politik yang tidak berlandaskan spiritual biasanya sangat dekat dengan korupsi kolusi dan nepotisme. Hal tersebut tercermin dari banyaknya kasus yang menimpa para politikus kita di Indonesia sekarang ini.

Memang untuk melakukan semua itu sangat sulit sekali karena kita tahu demokrasi kita seperti racun yang membawa setiap orang pada kebusukan dan kemunafikan sehingga siapapun para pejabat yang naik ke dalam posisi-posisi penting biasanya tidak terlepas dari perilaku yang menyimpang. Hanya pribadi yang suci dan mampu menjaga jiwanya tetap bersih yang mampu menahan godaan duniawi lah yang bisa mengalahkan ego pribadi untuk tidak melakukan penyimpangan terhadap jabatan yang diamanatkan kepada dirinya. Seorang pejabat atau penguasa biasanya sulit

menahan godaan semacam ini, karena kekuasaan ibaratkan air laut yang ketika diminum maka akan semakin haus, begitulah kekuasaan bila dipakai untuk jalan yang salah. Namun apabila kekuasaan itu memiliki nilai spiritualitas terutama spiritualitas tentang agama maka kekuasaan tersebut diibaratkan seperti keran air yang akan selalu memberikan air pada setiap orang yang membutuhkan sehingga kekuasaan tersebut tidak dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri.

Solusi untuk Memperbaiki Spiritualitas Politik Di Indonesia

Adapun gagasan yang ditawarkan untuk memperbaiki itu semua agaknya tidak mungkin kita pungkiri bahwa peran dan posisi pemerintah dalam mengatur kehidupan rakyat dan bangsanya masih sangat berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan negara walaupun dalam situasi yang kritis. Namun ketika krisis kepercayaan dan legitimasi terhadap pemimpin dan pemerintah dipermasalahkan, maka yang terjadi kemudian adalah mandatnya usaha yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah itu sendiri titik pada masalah legitimasi, HAM dan moralitas pemimpin bangsa sangat sial sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat semua itu penulis melihat ada beberapa hal penting yang harus diusahakan terkait memperbaiki spiritualitas kita dalam berpolitik

Mendorong Pemerintah Untuk Melakukan Perbaikan Moral Para Politikus

Terkait hal ini maka yang diperlukan adalah usaha bersama dan meningkatkan kesadaran pemerintah tentang pentingnya membangkitkan spiritualitas politik di Indonesia. Kita tahu bahwa saat ini Indonesia sedang kehilangan identitas pribadi baik sebagai bangsa maupun sebagai negara yang memang sangat jauh dari cita-cita dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal tersebut terjadi bukanlah karena kesalahan sistem yang ada di dalam negara tapi lebih dititikberatkan kepada para personal yang menjalankan sistem

tersebut titik sistem yang baik sekalipun bila tidak didukung oleh para personal yang baik untuk menjalankan undang-undang Maka hasilnya akan sangat buruk sekali.

Di Indonesia kita kehilangan sosok seorang pemimpin yang bisa dipercaya dan mampu memegang amanah. Indonesia membutuhkan para pemimpin yang mempunyai sifat-sifat seperti Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi para pemimpin maupun politikus di Indonesia. seperti kita tahu Nabi Muhammad saw selalu menempatkan dirinya di tengah-tengah umat yang membutuhkan pertolongannya. Kehadirannya sebagai sosok pemimpin umat maupun sekaligus pemimpin negara tidak pernah menyurutkan nya dalam mengisikehidupan di sekitarnya dengan nilai-nilai agama. Sehingga nilai spiritualitas yang tidak hanya masuk ke dalam hati dan jiwa umat Islam saja namun juga terbangun dalam sistem ketatanegaraan di zamannya. Ini membuktikan bahwa kehadiran sosok yang dekat dengan agama memberi warna tersendiri pada lingkungan sekitarnya.

Semakin rumitnya perkembangan badan politik yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, tidak Membuat konsep konsep masa sebelum Islam lainnya dari kehidupan masyarakat proses perkembangan tersebut dapat dipandang sebagai sesuatu yang telah terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip masa sebelum Islam di Madinah yang diperkirakan Muhammad telah bergabung dalam satu persekutuan sebelum itu juga telah melakukan persekutuan dengan beberapa suku pengembara yang bertetangga.¹⁵⁷ Hal ini membuktikan bahwa kehadiran agama di dalam politik tidak berarti menghapuskan nilai-nilai yang terbangun di dalam suatu peradaban masyarakat. Jadi dengan ini argumen yang menyatakan bahwa keberadaan agama tidak bisa menyatu dengan politik adalah salah, pikiran-pikiran tersebut adalah pikiran-pikiran yang dibangun atas dasar pikiran sekularisme di mana memisahkan agama dan negara.

Hal semacam ini sebenarnya berkaitan dengan moral para politikus politik di Indonesia secara umum belum berhasil mencapai efektivitas politik salah satu pangkal inefektivitas politik ini adalah masalah kepemimpinan. Tidak adanya sifat-sifat nabi yang dimiliki pemimpin ataupun para pemegang kekuasaan di Indonesia ini. Menjadikan spiritualitas di Indonesia tidak hadir dalam politik inilah mungkin menjadi salah satu masalah utama keringnya nilai-nilai spiritualitas dalam politik Indonesia.

Melakukan Gerakan-Gerakan Yang Dapat Mereduksi Kelompok Kepentingan

Seperti kita tahu bahwa di Indonesia saat ini banyak sekali kelompok kepentingan baik yang berupa partai politik maupun organisasi Masa, satu hal yang cukup mengkhawatirkan buat kita semua adalah gerakan-gerakan ataupun kelompok-kelompok kepentingan tersebut sama sekali tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak tapi hanya berpusat pada kepentingan kelompoknya sendiri. Hal ini menjadikan terbagi-bagi dan terkotak-kotak dalam, kepentingannya masing-masing semuanya larut dalam mencari dan memenuhi kepentingan pribadi dan golongannya. Suatu hal yang cukup mengkhawatirkan kita dalam upaya menciptakan suasana reformasi yang damai adalah individual dan intoleran terhadap sekitar, maka untuk itu ruler ciptakan suatu sistem ataupun cara untuk mereduksi kelompok kepentingan yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi dan golongan yang semata dan bukan pada kepentingan rakyat maka seniman mungkin harus ada undang-undang yang mengatur ini semua ataupun setidaknya ada gerakan-gerakan yang membangkitkan kesadaran kita semua.

Melakukan gerakan untuk mereduksi kelompok kepentingan tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara-cara demokratis dan tidak melawan undang-undang agar gerakan tersebut tidak dikategorikan dan diindikasikan sebagai suatu gerakan radikal. Hal ini memang cukup sulit saat ini setiap

gerakan yang mengkritisi atau pun mencoba berposisi melawan Pemerintah dikategorikan sebagai suatu gerakan radikal padahal. gerakan-gerakan tersebut merupakan suatu gerakan sebagai upaya menyuarakan kepentingan rakyat yang saat ini semakin hilang di tengah tengah kita.

Gerakan-gerakan ini haruslah terus ada untuk menciptakan tekanan kepada mereka yang ingin merusak biar menodai nilai-nilai spiritualitas yang harusnya ada di dalam politik Indonesia. Semangat untuk memulai perubahan haruslah terus ditularkan pada generasi mendatang, setidaknya dengan cara ini maka semangat tersebut akan terus hadir dari generasi ke generasi sehingga biarpun perubahan tidak bisa dilakukan di saat ini setidaknya perubahan bisa dilakukan oleh generasi yang akan datang. Pikiran ini bukanlah pikiran yang ingin mengganggu ataupun menggoyang proses jalannya pemerintahan tapi gerakan dan pikiran ini untuk menjawab semangat demokrasi di Indonesia yang saat ini semakin hilang ditindas oleh ketakutan terhadap upaya-upaya yang dilakukan demokrasi di Indonesia. Gerakan-gerakan untuk kelompok kepentingan jangan hari pahami sebagai suatu gelombang yang akan meruntuhkan pemerintahan sebaliknya gerakan ini perlu ada untuk menguatkan pemerintahan ataupun mengirim pemerintahan kepada jalan yang benar itu jalan yang telah ditetapkan oleh undang-undang Dasar 1945.

Fungsionalisasi Para Cendekiawan Dan Tokoh Agama Dalam Memberikan Spiritualitas Politik

Gelombang untuk mengisi politik di Indonesia bukanlah sesuatu yang harus ditakuti karena gerakan tersebut Bukankah gerakan ekstrimis maupun gerakan-gerakan yang mampu mencederai demokrasi kita namun gerakan yang dimaksud disini adalah gerakan spiritual yang bisa di Suarakan lewat dakwah maupun gerakan pikiran ataupun akademis kita tahu bahwa gerakan dakwah maupun gerakan pikiran melalui para akademisi pendidikan punya pengaruh yang cukup besar di tengah masyarakat meskipun untuk

melakukan itu butuh waktu yang cukup lama setidaknya hasil yang didapatkan kan kan untuk menanamkan spiritualitas dalam politik di Indonesia memiliki harapan yang pasti dibandingkan melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya ekstrimis ataupun kekerasan. Karena setidaknya kita tahu di Indonesia masih banyak orang-orang yang cerdas dan berpikiran waras untuk membangun negara menjadi lebih baik.

Fungsionalisasi cendekiawan dan tokoh agama untuk memberikan spiritualitas politik Indonesia merupakan salah satu solusi yang paling aman bila ingin menjaga keutuhan bangsa. Tidak tahu bahwa bangsa ini sama sekali tidak kekurangan tokoh politik maupun para cendekiawan yang cerdas untuk membangun bangsa, hanya saja beberapa tokoh agama maupun tokoh cendekiawan di Indonesia saat ini kehilangan idealis mereka. Sehingga yang terjadi adalah munculnya para tokoh tokoh yang memakai topeng idealitas palsu demi mendapatkan posisi atau jabatan tertentu. Sangat ironis sekali bahwa orang-orang yang kita harapkan dapat membangun ataupun spritualitas di dalam politik malah kehilangan idealis untuk melakukannya.

Para cendekiawan dan tokoh agama Harusnya menjadi filter dalam bernegara dan mengingatkan para penguasa akan tujuan dan cita-cita bangsa. Karena kita tahu pondasinya terletak pada kedua hal tersebut. 2 golongan tersebut dalam berbagai situasi hendaknya selalu memposisikan dirinya sebagai solution maker dan spirit Wisdom buat bangsa dan rakyatnya yang selalu menanti sumbangan buah pikiran yang jernih dan Cemerlang. Sikap objektif, terbuka, berani, dan bertanggung jawab merupakan prinsip-prinsip penting yang tidak boleh ditinggalkan oleh golongan ini yang menyadari eksistensi mereka sebagai pemegang kedudukan strategis dalam menentukan hasil yang akan dicapai oleh reformasi yang terus diperjuangkan hingga saat sekarang ini.

Mengedepankan Sikap Kritis Terhadap Segala Hal Yang Menghambat Spiritualitas Politik

Kita tahu bersama bahwa untuk membangun spiritualitas politik di negara Indonesia saat ini sangat berat karena memiliki berbagai macam hambatan dan tantangan. Namun untuk menghadapi semua itu kita tidak boleh berdiam diri saja dan mengabaikan segala hal yang terjadi. Untuk itu diperlukan sikap kritis yang mampu mengkritisi segala pikiran yang dapat menghambat pembangunan spiritualitas politik Indonesia, seperti yang kita tahu bersama bahwa segala sesuatu yang terlihat tidak seperti kelihatannya. Diperlukan suatu pikiran cerdas, dan mempertanyakan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan jalan yang benar. Pikiran itulah yang seharusnya ada ditengah-tengah kita. Dimana Dengan mempertanyakan segala sesuatu yang kita anggap lari dari Muhammad sebenarnya menjadikan pikiran kita menjadi lebih tajam dalam menganalisis segala permasalahan di sekitar kita.

Untuk membangun spiritualitas politik pastilah memiliki tantangan yang harus dihadapi, termasuk tantangan dari berbagai macam pikiran yang berseberangan dengan pikiran untuk membangun spiritualitas politik. Konfrontasi dalam pemikiran spiritualitas politik pastinya akan tetap ada, karena kita tahu Tidak semua orang sepekat melihat politik memiliki energi spiritual di dalamnya. Anggaplah itu sebagai sebuah tantangan dalam memajukan pikiran kita, dan janganlah dipandang sebagai sebuah masalah yang tidak dapat diselesaikan. Untuk itu yang Perlu diperbaiki adalah bagaimana cara kita mengkritisi sesuatu dan hal yang harus dibenahi dengan penuh optimisme sekaligus kesegaran bahwa usaha ini akan memakan waktu yang sangat panjang dan mesti berkesinambungan upaya mengkritisi terhadap segala sesuatu yang menghambat spiritualitas politik merupakan upaya yang sangat strategis peranannya dan posisinya dalam merealisasikan cita-cita reformasi damai. Karena dengan demikian sesungguhnya kedewasaan berpolitik itu akan tumbuh secara baik dan matang yang selanjutnya akan mentradisi sehingga persoalan Apapun yang terjadi tidak disikapi secara emosional dan sentimentil, tapi akan dihadapi

dengan dan diselesaikan secara objektif, bermoral, dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Hendaknya kita memiliki spiritual yang pasti dalam bernegara karena politik yang hilang spiritualitasnya maka akan menjadi kosong dan berpeluang untuk menuju ke arah keburukan maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia adalah mengisi kekosongan spiritual tersebut dengan spirit yang baik agama menawarkan hal tersebut dimana agama dan negara bisa menjadi satu kesatuan Meskipun tidak terimplementasikan secara real lewat undang-undang namun setidaknya nilai-nilai dan norma-norma yang terangkum dalam undang-undang tersebut memiliki semangat spiritualitas dan religiusitas yang bisa diterima oleh setiap agama yang ada di Indonesia saat ini karena tidak tahu biarpun Negara Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dengan penduduk Islam nya yang cukup banyak namun Indonesia bukanlah negara Islam.

Maka dari itu kita wajib memahami spiritualitas politik yang ada di negara kita hendaklah dapat diterima oleh semua agama namun esensi spiritualitas dan religiusitas itu tidak hilang hanya karena masalah toleransi beragama. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa politik di Indonesia tidak boleh kering nilai-nilai dengan mengedepankan sikap cinta tanah air, dan semangat membela agama kedua hal tersebut dapat dijadikan satu kesatuan yang mampu menyatukan pikiran banyak orang dan semangat ataupun spiritualitas setiap orang terangkum dalam suatu wadah yang kita sebut NKRI. Maka NKRI sebagai harga hendaklah menjadi wadah bagi semua golongan suku agama ras adat istiadat apapun yang menjadi bagian dari Indonesia karena kita tahu bahwa kemajemukan tersebut merupakan hal yang menjadi pondasi dasar bagi kemajuan Indonesia yang lebih baik

Daftar Rujukan

- Atika ulfia adlina 2018 *Agama Dalam Dimensi Politik Dan Spiritualitas* Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi Volume 04 No. 01 Juni 2018. <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart> diakses pada tanggal 8 maret 2020
- Dept. Pend. Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2012.
- Frithjof Schuon, *The Transcendent Unity of Religions*, (Wheaton: Theosophical Publishing House, 1984), h. 15.
- Frithjof Schuon, *The Transcendent Unity of Religions*, Wheaton : Theosophical Publishing House, 1984.
- George Mc Turner, Kahin, Guy J. Pauker, *Comparative Politics of Non Westren Countries, American* dalam *Political Science Review*, (London : The Free Press, 1977), h. 1022-1041
- J. P. Chaplin, *Dictionary of Psycholog*, New York : Dell Publishing, Co., Inc., 1981.
- Jalauddin, *Psikologi Agama*, Jakarta : Grafindo, 2010.
- James A. Gould dan Vincent V. Thursby, ed., *Contemporary Political Thought, Issues in Scope, Value and Direction*, Holt : Rinehart and Winston, Inc., 1969.
- Komaruddin Hidayat, *Agama Punya Seribu Nyawa*, Jakarta : Noura Books, 2012.
- Loren Bagus. *Kamus Filsafat*, Jakarta : Gramedia : 2005.
- Lucian W Pye, *The Non-Westren Political Process, Journal of Politics*, (Chicago : University of Chicago Press, 1965), h. 468-86.
- Max Weber, *Essay from Max Weber*, Cambridge : Polity Press, 2002.
- Muhamad Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, Djakarta, Bukit Siguntang, Tjetakan kedua, 1971, hal 109-
- Murthadah Muthahari, *Dasar-Dasar Epistemologi Pendidikan Islam, Teori Nalar dan Pengembangan Potensi serta Analisa Etika dalam Program Pendidikan*, Jakarta : Sadra Press, 2011.
- Nurcholish Madjid, et. al. , *Demokratisasi Sistem Politik : Belajar dari Sistem Kekhalifahan Klasik*, dalam

Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern (Respons dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani), Jakarta : Mediacita, 2004.

- Paulus Eko Kristianto. Persinggungan Agama Dan Politik Dalam Teror: *Menuju Terbentuknya Teologi Spiritualitas Politik dalam Konteks Maraknya Terorisme Di Indonesia* . Dunamis Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani Volume 3, Nomor 1 (Oktober 2018) <https://media.neliti.com/media/publications/275343-persinggungan-agama-dan-politik-dalam-te-6e97b448.pdf> diakses pada tanggal 20 mei 2020
- Rahmat, Jalaludin. 2002. "Dibutuhkan Kecerdasan Spiritual untuk Jadi Pemimpin yang Unggul." *Kompas.com*. diakses pada tanggal 8 juni 2020
- Sinnott, J. D. (1998). *The development of logic in adulthood: Postformal thought and its applications*. New York: Plenum.
- Siti Faridah, Jerico Mathias 2018 *Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu*. 2018 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/sn> diakses pada tanggal 9 april 2020
- Sofa Muthohar *Fenomena Spiritualitas Terapan Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Di Era Global* 2014:436 jurnal walisongo .ac.id